

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 penduduk Indonesia mencapai jumlah **255,993,674** orang. Dengan statusnya sebagai negara berkembang dan pertumbuhan penduduk yang terus naik, Pemerintahan Indonesia harus terus melaksanakan pembangunan nasional demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara bisa dilihat dari APBN negara tersebut. RAPBN-P 2016 menunjukkan adanya target-target besar yang ingin dicapai dalam upaya menjadi negara yang lebih maju lagi. Target pembangunan nasional yang semakin banyak tentunya berbanding lurus dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Dana untuk APBN bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya adalah dari sektor pajak. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan negara sektor lain seperti hibah, bea cukai masuk, dan pungutan ekspor. Jadi, dengan kebutuhan dana APBN yang meningkat, penerimaan pajak juga harus ditingkatkan. Sesuai dengan pengertian pajak, pajak terutang oleh Orang Pribadi atau Badan dan juga bersifat memaksa.

Maka seharusnya sudah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak. Namun, di sisi lain pajak sebagai kontribusi masyarakat ke negara tidak memberikan timbal balik secara langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak.

Dari sekian banyak penduduk Indonesia dan potensi pajak yang ada, hanya sebagian kecil saja yang sadar akan kewajiban membayar pajaknya. Padahal sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai solusi dari masalah tunggakan pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan penagihan.

Pada kenyataannya Wajib Pajak masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban seperti tidak melaporkan SPT dengan benar atau sesuai dengan kenyataan, sehingga fiskus harus menerbitkan produk hukum berupa STP, SKPKB, SKPKBT, dan sebagainya. Jika terhadap produk hukum yang telah diterbitkan tersebut Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penagihan aktif dengan cara menerbitkan Surat Teguran atau surat peringatan lainnya.

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses penagihan aktif. Surat Teguran adalah tahap awal penagihan aktif agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya tepat waktu. Meskipun Surat Teguran telah diterbitkan, pada kenyataan di lapangannya masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak merespon Surat Teguran tersebut sehingga harus dilakukan penagihan aktif dengan Surat Paksa.

Surat Paksa merupakan salah satu sarana pengadministrasian yang sangat penting untuk mencapai penerimaan pendapatan pajak. Jika Surat Paksa telah diterbitkan, Wajib Pajak tetap tidak mersepon maka harus dilakukan penagihan aktif dengan Tindakan Penyitaan. Namun ada kalanya Juru Sita Pajak tidak menemukan Objek Pajak sita yang akan disita, maka tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan dan pengumuman di media massa dapat dilakukan, Walaupun tindakan penyitaan telah dilakukan bahkan mungkin telah dilakukan lelang atas barang yang disita, Akan tetapi tidak mencukupi

untuk melunasi utang pajak, Maka tindakan pencegahan dan lain lain masih tetap dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak. Karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan Proses Penerbitan Penagihan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan Lelang terhadap utang pajak dan efektivitasnya dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan.

Pada setiap penerapan aturan pasti ada kendala atau masalah yang dihadapi, Penulis juga akan mendeskripsikan masalah-masalah tersebut beserta upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dalam menyelesaikannya. Penulis akan membahasnya dalam Laporan Tugas Akhir ini berjudul “ **PROSES DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN** “

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang Lingkup pembahasan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan penagihan pajak aktif. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya agar tidak menyimpang dari judul penelitian.

Ruang Lingkup pembahasan masalah dapat dirumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian meliputi :

1. Pengertian pajak
2. Fungsi dan sistem pemungutan pajak
3. Utang Pajak
4. Tinjauan teori penagihan pajak
5. Dasar hukum tentang penagihan pajak
6. Pejabat dan jurusita pajak
7. Jangka waktu dan kadaluwarsa penagihan pajak
8. Proses penagihan pajak aktif berdasarkan SOP dan Peraturan Pemerintahan

9. Data mengenai efektivitas tindakan penagihan pajak aktif pada KPP Pratama Pekalongan
10. Kendala – kendala juru sita pajak melakukan penyampaian penagihan pajak

### **1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Dari pengamatan dan praktek lapangan, banyak ilmu yang diperoleh tentang proses penagihan pajak aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai studi banding antara hasil studi yang didapat selama praktek dengan penerapan teori yang didapat pada masa kuliah.
2. Memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perapajakan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Untuk mengetahui proses penerbitan penagihan aktif pada Surat Teguran sampai dengan Tindakan Penyitaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan yang sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui data mengenai Efektivitas terhadap utang pajak dan pencairan utang pajak yang di targetkan dan diterima di Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan.
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dalam melaksanakan penagihan pajak aktif.
6. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Jurusita Pajak dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan penagihan utang pajak.

### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Diponegoro pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

#### 2. Bagi Penulis

Mahasiswa ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang proses tindakan penagihan pajak aktif. Laporan Tugas Akhir ini diharapkan mendorong mahasiswa belajar mengetahui situasi dunia kerja dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya.

#### 3. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulis membuat laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan referensi yang diharapkan dapat menambah informasi tentang proses tindakan penagihan pajak aktif dan sebagai pembelajaran berdasarkan kasus nyata di dunia kerja untuk menciptakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

## 1.4 Metode Pengumpulan Data

### 1.4.1 Jenis – jenis Data

Adapun beberapa jenis – jenis metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, meliputi :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki,2005:60)

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi (J. Supranto, 2003:21).

Dengan berdasarkan sifatnya :

a. Data Kuantitatif

Adalah data yang meliputi angka (J. Supranto,2003:20).

b. Data Kualitatif

Adalah data yang tidak berupa angka (J. Supranto,2003:20).

#### 1.4.2 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut, antara lain:

1. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau konsultasi secara langsung dengan Seksi Penagihan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan pembahasan.

2. Observasi Lapangan

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung peristiwa, keadaan, dan proses di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data perpajakan baik kualitatif maupun kuantitatif, yang kemudian akan diolah agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan pembahasan.

3. Pemeriksaan Dokumen

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, dimana dokumen tersebut mempunyai relevansi dengan obyek yang dibahas.

4. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, situs internet, undang-undang, petunjuk pelaksanaan undang-undang, peraturan terkait, dan sumber tertulis lainnya seperti materi

yang telah diajarkan selama kegiatan perkuliahan sebagai sumber obyek pembahasan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis menyajikan hasil penulisan Sistematika dalam Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan masing – masing bab terbagi dalam subbab –subbab dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah, Adapun sistematika penulisan tugas akhir :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penulisan, Tujuan Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Jenis-jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika penyajian yang dibuat dan digunakan dalam proses menyusun laporan Tugas Akhir ini.

#### **2. BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN**

Bab ini berisi tentang Sejarah KPP Pratama Pekalongan, wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan, Visi Misi dan Nilai KPP Pratama Pekalongan, Struktur Organisasi KPP Pratama Pekalongan, Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing seksi KPP Pratama Pekalongan.

#### **3. BAB III PROSES DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF**

Bab ini berisi tentang pokok pajak yang menjadi tinjauan teori dalam kegiatan Penagihan Pajak Aktif yang meliputi antara lain, Pengertian perpajakan fungsi dan sistem pemunggutan pajak, Pengertian utang pajak, Tinjauan teori penagihan pajak, Dasar hukum tentang penagihan pajak, Pejabat dan Juru Sita Pajak, Jangka waktu dan kadaluwarsa penagihan pajak, Proses Penerbitan Penagihan pajak aktif berdasarkan SOP dan Peraturan Pemerintah, Data dan efektivitas atas

tindakan penagihan pajak aktif. Kendala- kendala yang dihadapi oleh Juru Sita pajak dalam melakukan penagihan pajak.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang berkaitan dengan proses tindakan dan penerbitan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan beserta efektivitasnya terhadap penerimaan pajak, tunggakan dan pencairan utang pajak.